DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Jakarta: Genta Publishing, 2012, hlm. 78.

Bappenas, *Kajian Penegakan Hukum Pidana Anak*, 2019.

(Halim, 2009; Harefa, 2017; Ii, n.d.; Ii et al., 1997; Mulyana Saputri et al., 2024; Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020; Sandhi Amukti Bahar, Supanto, 2015; Saputri et al., 2024) Halim, A. (2009). Teori-Teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya. *Jurnal Asy-Syir'ah*, *42*(2), 396–397.

Harefa, B. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Perspektif*, *22*(3), 212. https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i3.647

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), *Evaluasi Implementasi UU SPPA*, 2021.

Ii, B. A. B. (n.d.). *Barda Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra aditia Bakti, Bandung, Hlm. 22*. 1–13.

Ii, B. A. B., Anak, A. P., & Anak, P. (1997). *Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Ahmad, Melanie Pita Lestari, Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan (Malang: Madza Media, 2021), h. 23. 35 21*. *18*(39), 21–50

Interview dengan Dosen Hukum Pidana Universitas Indonesia, 10 Desember 2023. ↩

Ibid., Pasal 6 dan Pasal 69–83.

Konvensi Hak Anak, diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, Pasal 37(b).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Laporan Tahunan 2023*.

Konvensi Hak Anak (CRC), Pasal 2; diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), *Data Statistik 2022*.

Kemendikbud, *Modul Pendidikan Karakter dan Pendidikan Seksualitas*, 2022. ↩

Konvensi Hak Anak, diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Modul Pendidikan Seksual di Sekolah*, 2021.

Komnas Perlindungan Anak, *Kajian Kekerasan Seksual Anak dan Keluarga*, 2023.

KemenPPPA, *Pedoman Koordinasi Lintas Sektor Penanganan Anak ABH*, 2020

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Laporan Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum*, 2022.

Laporan ICJR, *Evaluasi Pelaksanaan Diversi di Indonesia*, 2020. ↩

Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 154.

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2002), hlm. 155.

Muhammad Mustofa, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 92. ↩

Mulyana Saputri, R., Wahyuni, F., & Muhsin, M. (2024). Analisis Kebijakan Dalam Hukum Pidana Perlindungan Anak Pada Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, *10*(2), 133–139. https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v10i2.407

Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). Sandhi Amukti Bahar, Supanto, R. A. F. (2015). Penerapan Saksi Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2014/Pn.Yyk). *Jurnal Recidive*, *4*(1), 110–119. http://repository.unissula.ac.id/12339/2/babI.pdf

Saputri, R., Harliana, E., & Syihabuddin. (2024). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *KEADILAN : Jurnal Penelitian Hukum Dan Peradilan*, *2*(1), 53–62.

UNICEF Indonesia, *Justice for Children in Indonesia: Situation Analysis*, 2020.

UNICEF Indonesia, *Laporan Kebutuhan Psikologis Anak dalam Sistem Peradilan*, 2021.

UNICEF Indonesia, *Justice for Children in Indonesia*, 2020.

UNICEF Indonesia, *Justice for Children: Policy Brief*, 2020, hlm. 6.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (3).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 50 dan 51.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 5.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 64.

UU SPPA, Pasal 5 dan Pasal 6.

UU SPPA, Pasal 54 dan Pasal 55.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

UU SPPA, Pasal 2 dan Pasal 6.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (2).